

ISLAM DEMOKRASI DAN PLURALISME (Telaah terhadap Islam Moderat di Indonesia)

Dadang Mustajab
STAI Al-Qodiri
Patrang Jember
e-mail: Dadang_Mustajab@yahoo.com

Abstrak

Ketika masyarakat menggunakan kata demokrasi, mereka acapkali memaknai dengan hal-hal yang berbeda, bahkan tidak jarang malah kontradiktif. Jika demokrasi berarti persamaan yang formal di hadapan hukum, maka hal itu bukan hanya sesuai dengan Islam, bahkan jika kita melihat catatan sejarah, Islamlah agama yang memperkenalkan konsep persamaan di hadapan hukum secara formal di muka bumi. Demokrasi dan pluralisme memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Semakin banyak dibicarakan, semakin menarik dan tak ada habis-habisnya. Sepintas ia seolah bersifat elitis, tapi semakin dalam kita menyelami semakin tahu bahwa ia adalah kehidupan kita sendiri. Itu sekarang dikenal dengan sebutan "living democracy and pluralism". Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa demokrasi dan pluralisme merupakan produk pemikiran manusia yang paling cerdas.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Pluralisme

Pendahuluan

Agama dikalangan para penganutnya diyakini dapat mendatangkan rasa aman tenteram dan kedamaian dalam kehidupan, karena bagi mereka agama berisi petunjuk hidup yang paling memadai untuk manusia. Agama adalah acuan hidup dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek kehidupan bersama atau kehidupan sosial.¹

Agama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya heterogenitas masyarakat. Satu fenomena menarik terkait dengan eksistensi agama ditengah kehidupan sosial adalah munculnya konflik sosial yang berlatar belakang keanekaragaman agama. Agama menuntut loyalitas yang melebihi apapun dari setiap penganutnya. Loyalitas total seorang penganut agama terhadap agamanya seringkali menyebabkan konflik dengan penganut agama yang berbeda.² Persoalannya, apakah kehidupan bersama yang damai yang diajarkan oleh setiap agama harus dikorbankan atas nama agama, bagaimana bentuk dan dimanakah batas loyalitas terhadap agama dalam konteks heterogenitas masyarakat?

Selama ini wacana hubungan Islam dan demokrasi belum pernah diletakkan dalam perdebatan intelektual di tanah air. Perbincangan seputar isu tersebut muncul secara sporadis dan tidak utuh, sehingga cenderung membingungkan dan bahkan mendorong munculnya penyikapan simplifikatif di kalangan kaum Muslim. Hingga

¹ Arqom Kuswanjono, *Ketuhanan dalam Telaah Filsafat Perennial Refleksi Pluralisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2006), iii.

² Ibid.

belakangan ini, wacana yang berkembang lebih banyak menyangkut pro-kontra penerapan atau formalisasi syariat Islam.³

Pada ranah global sekalipun, jauh panggang untuk dikatakan bahwa perdebatan hubungan antara Islam dan demokrasi telah tuntas. Kendati sejak dasawarsa 1980-an demokrasi telah menjadi *non*, namun buku-buku yang mengulas tentang transisi demokrasi di Amerika Latin, Eropa Selatan, Afrika dan Asia, dengan sengaja sejumlah penulis tidak melibatkan dunia Islam. Ada beberapa penjelasan mengenai kelangkaan demokrasi di dunia Islam.

Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Kedourie bahwa "gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mind-set* Islam". *Kedua*, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara Muslim sejak paruh pertama abad kedua puluh tapi gagal. Tampaknya ia tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural komunitas-komunitas Muslim sudah terbiasa dengan "otokratis dan kepatuhan pasif". Teori ini dikembangkan Bernard Lewis dan Ajami. *Ketiga*, lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun sentimen demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran diatas segalanya. Esposito dan Voll adalah diantara mereka yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam.⁴

Para ahli melihat ada 3 sikap orang dalam beragama. *Pertama*, sikap yang eksklusif dalam melihat agama, yaitu sikap yang menganggap bahwa agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyebarkan bagi pengikutnya. *Kedua*, sikap inklusif, yaitu sikap yang menganggap bahwa agama-agama lain adalah bentuk implisit suatu agama tertentu. *Ketiga*, sikap pluralis, suatu sikap yang ditunjukkan oleh para kaum perenialis, yang terekspresikan dalam macam-macam rumusan, misalnya agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran. Agama-agama lain berbicara secara berbeda tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah, atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran.⁵

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka tentunya dibutuhkan pemahaman dan penghayatan yang dewasa dalam beragama. Eksklusivitas agama perlu diimbangi dengan inklusivitas. Penghayatan eksoteris-esoteris harus integratif. Fanatisme harus diimbangi dengan toleransi, sehingga agama sungguh-sungguh menjadi *rahmatat lil 'alamin*. Toleransi dalam beragama akan menghasilkan kebersamaan dalam menjaga agama-agama dari masing-masing pemeluknya. Bagaimana Rasulullah sangat menghargai terhadap perbedaan beragama, karena hanya dengan menghargai perbedaan itu, maka nilai-nilai serta ajaran-ajaran agama itu akan menjadi bermakna dalam pengaktualisasikan isi ajaran agama itu sendiri. Islam sebagai agama yang menghargai terhadap perbedaan harus tetap berada di garda terdepan untuk menjaga pluralitas dalam beragama. Karena alasan apapun, penganut agama tidak diperbolehkan bersikap eksklusif apalagi merasa paling benar sekaligus mengkafirkan agama dan kelompok lain. Jika ini yang terjadi, maka Islam bukan lagi sebagai agama *rahmatat lil 'alamin*, melainkan menjadi agama yang akan dijauhi dan ditakuti umat termasuk oleh pemeluknya sendiri.

³ Bernard Lewis, *Islam Liberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002), ix.

⁴ *Ibid.*, x.

⁵ Arqom Kuswanjono, *Ketuhanan dalam Telaah*, 5.

Prinsip-prinsip Demokrasi : Suatu Pandangan Islam

Sudah seringkali kita dihadapkan dengan kenyataan adanya kesalahan persepsi bagaimana hubungan antara Islam dan negara, atau secara khusus hubungan antara Islam dan demokrasi. Hal itu dapat terjadi karena bersumber dari ketidakpahaman orang terhadap Islam dan juga karena pada saat sekarang ini tidak ada satu negara pun di dunia modern yang mencoba menjalankan ajaran Islam dengan benar sehingga tidak ada yang menjadi sumber acuan untuk itu.⁶

Dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah sistem pemerintahan Islam dalam kerangka prinsip demokrasi bahwa "kehendak rakyat harus menjadi basis otoritas pemerintahan." Kehendak rakyat diekspresikan dalam dua cara. *Pertama*, melalui pemilihan kepala negara oleh rakyat, dan *kedua*, prosedur pemilihan kepala negara Islam.

Secara historis, doktrin yang menyebutkan bahwa kehendak rakyat sebagai basis otoritas pemerintahan itu dirumuskan di Barat sebagai respon terhadap raja-raja yang mengklaim memiliki hak Ilahi untuk memimpin. Kendati ada banyak contoh otoritarianisme pemerintahan di dunia Arab dan Muslim, umumnya sepanjang sejarah tidak ada yang mengklaim bahwa mereka memerintah karena hak Ilahi, atau minimal karena diperintah oleh Nabi.⁷ Rasulullah saw sendiri dipilih sebagai pemimpin kaum Muslim melalui proses bai'at. Para penggantinya pun dipilih dengan cara serupa. Sebagai kepala negara Islam, mereka memerintah sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, bukan sebagai wakil-Nya di atas bumi.

Oleh karena proses bai'at ini terjadi berulang kali untuk pemilihan kepala negara Muslim, maka perlu menelaah proses bai'at ini dalam upaya menentukan karakteristik demokrasi yang telah dipraktekkan oleh Islam.

Untuk kondisi saat ini sangat dimungkinkan dan sangat penting untuk mendiskusikan pengembangan Islam yang demokrasi dan pluralisme di tengah-tengah ancaman gerakan Islam yang progresif dan liberal yang tentunya akan mengancam terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang sempurna. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang tidak pernah mengenal suku, etnis, ras, budaya bangsa dan negara.⁸

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu menghargai perbedaan-perbedaan keagamaan, karena masalah itu adalah masalah hak asasi. Jadi, memeluk agama apapun dan meyakini agama apapun Islam tidak perlu intervensi. Karena itu semua terkait dengan keyakinan masing-masing umat.

Marzuki Wahid memiliki redaksi sendiri tentang Islam dan pluralisme: angan-angan sosial politik demokratik Piagam Madinah, dimana ada tiga alasan yang bisa dikemukakan sebagai pertanggungjawaban dalam pemilihan redaksi tersebut.⁹ *Pertama*, kita menyepakati suatu pendapat bahwa baik al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber utama Islam, dalam berbagai teksnya tidak mengajarkan suatu bentuk

⁶ Negara-negara di Timur Tengah atau di Jazirah Arab yang kita kenal sebagai tempat asalnya agama Islam tidak satu pun yang memperlihatkan prinsip pemerintahan yang demokratis, karena kita tidak menemukan indikasi ke arah itu dengan jelas, seperti misalnya yang berkaitan dengan prinsip rekrutmen elit politik, pemilihan umum, kebebasan, rotasi kekuasaan dan lain sebagainya.

⁷ Bernard Lewis, *Islam Liberalisme*, 37.

⁸ Omid Safi, *Progressive Muslims (From the British Library, 2005)* 287.

⁹ Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam (Bandung: Nuansa, 2005)*, 94.

atau sistem pemerintah (negara) tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Sumber Islam itu hanya memberikan pedoman ajaran berupa seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip yang dimaksud bersifat universal sesuai dengan watak dasar Islam yang trans-historis dan eternal. Demikian juga Piagam Madinah yang dirumuskan Rasulullah saw bersama warganya. Piagam ini sama sekali tidak mencerminkan sebuah sistem negara atau pemerintahan yang baku, melainkan menggambarkan sejumlah prinsip luhur yang penting bagi kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara pola kenegaraan yang diterapkan Abu Bakat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta sistem-sistem negara lain yang mengklaim Islam, semuanya juga tak ada yang bersifat imperatif dan teologis. Keragaman tersebut semata-mata bersifat sosiologis-relativis yang tidak mengikat bagi umat Islam.¹⁰

Kedua, digunakan demokratis saja, bukan negara demokratis atau khilafah demokratis atau lainnya, karena angan-angan politik Islam dalam asumsi Marzuki Wahid tidak menentukan kepastian sebuah bentuk negara apapun. Karena itu, kebebasan merumuskan bentuk negara sebagai pelembagaan dan perwujudan nyata dari angan-angan tersebut terbuka lebar bagi kesejarahan umat Islam.

Untuk kata demokratis, para teorisi politik Islam memang terlalu hati-hati untuk menyebut bahwa Islam itu "demokratis". Karena jika demokratis, maka berarti Islam mengakui kedaulatan rakyat dimana otoritas syari'at Islam dapat dianulir oleh kesepakatan rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. Kekhawatiran ini pernah menghantui pemikiran politik beberapa pemikir Islam, seperti Abu A'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb.

Dalam pandangan Marzuki Wahid tidak demikian, melainkan bahwa suatu komunitas jika demokratis, maka tentu komunitas itu akan mempertimbangkan syari'at Islam sebagai satuan hukum yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Karena, demokratis adalah proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang diangan-angankan dengan cara partisipatif dan mempertimbangkan pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

Dengan pemahaman ini, bisa jadi demokrasi menjadi suatu keniscayaan bagi kelompok Muslim manapun sebagai suatu cara untuk mengelola kehidupan bersama yang beragam baik secara etnik, agama, ras, status sosial, gender maupun kepentingan.

Ketiga, diambil "Piagam Madinah" sebagai basis kajian untuk mendapatkan wawasan tentang angan-angan sosial politik demokratis dalam tulisan ini, karena hampir semua pengkaji sejarah Islam mengakui bahwa "Piagam Madinah" merupakan instrumen hukum-politik yang membuat komunitas Islam dan non-Islam saat itu menuai kebebasan dan kemerdekaan di bawah kepemimpinan Nabi saw. Bahkan oleh sebagian pakar ilmu politik, "Piagam Madinah" dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan Nabi saw di Madinah.

Islam dan Demokrasi : Saling memperkuat atau tidak Compatible?

Perdebatan tentang Islam dan demokrasi telah mulai memperoleh tempat yang

¹⁰ Ibid., 95.

¹¹ Ibid., 97.

signifikan dalam pemikiran politik Islam modern.¹² Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan di dunia Islam, para pemikir dari kalangan Islam maupun sekuler dari masyarakat Muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok politik.

Banyak kalangan Muslim mengatakan bahwa Islam dan demokrasi adalah *compatible* (serasi, cocok), tetapi bagaimana keduanya *compatible*? Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan demokrasi itu? Bagaimana ia bekerja dalam kontek Islam? Bentuk demokrasi yang mana yang lebih diutamakan (*preferable*)?

Ali Nawaz Memon mengungkapkan bahwa demokrasi dicirikan oleh hak-hak dan kewajiban yang formal. Satu definisi dari kata demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas.

Sarjana Muslim terkemuka, Umar Chapra, menyebut empat kriteria dasar bagi pemerintahan yang absah dalam Islam. *Pertama*, pemerintah harus bertanggung jawab kepada Allah dan syari'ah-Nya. *Kedua*, pemerintah dipercaya dan bertanggung jawab kepada rakyat dengan memenuhi kepercayaan yang telah mereka berikan. *Ketiga*, harus ada musyawarah dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin, baik secara langsung maupun tidak. *Keempat*, harus ada keadilan dan persamaan bagi semua kalangan di hadapan hukum.¹³

Bila kita mengikuti berbagai pikiran yang berkembang di kalangan umat Islam, sebetulnya beragam pula strategi perjuangan umat telah berkembang. Namun, dengan sedikit menyederhanakan, paling tidak ada dua strategi yang sedang dominan. *Pertama*, Islamisasi masyarakat melalui jalur kekuasaan. *Kedua*, Islamisasi sebagai bagian dari proses pembangunan politik bangsa. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang pertama cenderung menuntut jatah terlebih dahulu dalam kekuasaan sebagai cermin *representativeness* dari sebuah negara demokratis. Sedangkan yang kedua cenderung untuk memperkuat demokrasi dulu, dan jatah kekuasaan itu akan ditentukan oleh mekanisme politik yang lebih sehat, tanpa tergantung pada kekuasaan.

Bila ditilik lebih mendalam, kedua pola strategi di atas sebenarnya mempunyai pijakan yang sama. Keduanya menyimpan asumsi bahwa mekanisme politik yang berkembang selama ini khususnya di Indonesia berjalan secara tidak fair atau tidak adil. Proses depolitisasi dan deideologisasi yang berlangsung sejak Orde Baru, telah menempatkan Islam sebagai mayoritas keterbelakangan politik dan ekonomi. Dan karena itu, persoalan yang mendasarinya menjadi sama pula, yakni bagaimana mendorong keterbelakangan umat ini dalam proses berbangsa dan bernegara.¹⁴

Bagi kita umat Islam di Indonesia, masalah demokrasi merupakan suatu agenda politik dan pemikiran yang teramat penting karena sebagian terbesar dari warga negara Republik ini beragama Islam atau paling tidak mengaku dirinya beragama Islam. Islam di Indonesia sangat percaya dan mengharapkan demokrasi sebagaimana mestinya, karena dengan demokrasi maka *islamic political cause* dapat diperjuangkan sehingga dengan demikian kepentingan-kepentingan Islam dalam arti luas (sosial, ekonomi dan politik) akan dapat terlindungi dengan lebih baik. Apalagi dalam konteks kehidupan politik sekarang ini di Indonesia, di mana disinyalir adanya semacam "bulan madu" antara Islam dan negara, sesuatu yang sebelumnya sama

¹² Fahmi Huwadi, *al-Islam wa al-Dimugratryah* (Beirut: al-Mustaqbal al-'Arabi, 1992), 166.

¹³ Bernard Lewis, *Islam Liberalisme*, 3.

¹⁴ Afan Gaffar cs., *Islam Demokrasi Atas Banah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 6.

sekali tidak pernah terbayangkan, sekarang sudah menjadi kenyataan.

Era bulan madu, demikian saat ini banyak pengamat melihat hubungan umat Islam dan pemerintah. Serelah sekian lama merasa tersingkirkan – atau disingkirkan dari percaturan politik, kini umat sebagai komunitas politik mulai mendapat akses untuk lebih banyak berperan dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Saat ini beberapa tokoh Islam menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Kelompok ini juga semakin leluasa untuk bergerak, baik demi kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan pengembangan sumberdaya sosial-ekonomi umat. Kegiatan keagamaan tak lagi hanya marak di dalam komunitas-komunitas santri yang eksklusif, tetapi juga merambah ke komunitas-komunitas yang dulu dimasukkan dalam kategori “ahangan”. Religiositas Islam juga merambah ke dalam komunitas birokrasi.¹⁵

Persoalannya, inikah yang menjadi tujuan umat selama ini? Bahwa menciptakan masyarakat Islami merupakan sasaran akhir dari arah perjuangan semua kelompok umat, berangkali tak ada yang membantahnya. Namun demikian, bagaimana menempatkan tujuan akhir dari perjuangan tersebut dalam konteks berbangsa dan bernegara? Tampaknya ini yang sampai saat ini masih menyimpan kontroversi.

Islam demokrasi adalah Islam yang mau mengakomodasi dari sekian perbedaan-perbedaan kepentingan, namun *endingnya* adalah untuk kemaslahatan umat Islam khususnya dan untuk bangsa umumnya. Disinilah peran Islam yang *rahmatul lil 'alamin* sangat di harapkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.

Pluralisme dan Islam Indonesia

Kalau kita berbicara nilai-nilai pluralisme dalam Islam, maka kita akan teringat Fazlurrahman. Dia menulis dalam bukunya, *Interpretation in the Qur'an*, bahwa ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan kepada nilai pluralisme Islam, yang apabila dihayati maka diharapkan hubungan antar sesama kita, manusia dengan segala macam keanekaragaman ideologi, *background* sosial, etnik dan sebagainya dapat terjembatani melalui nilai-nilai pluralisme Islam ini.

Berbicara pluralisme artinya bukan satu, tetapi plural (banyak). Dan banyak itu artinya berbeda, karena tidak ada yang sama. Maka kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena dia berbeda dengan kita. Itulah sebenarnya yang kita inginkan di Indonesia ini, yaitu adanya *respect* terhadap pendapat orang lain, dan inilah arti demokrasi. Tidak memaksakan kehendak satu kelompok kepada kelompok yang lain. Tetapi kita saling berinteraksi dengan baik, dan saling menghormati pendapat orang lain. Tidak eksklusif apalagi suka mengkafirkan kelompok lain dengan menjustifikasi kelompoknya sendiri yang paling suci dan paling benar dihadapan Allah swt. Kelompok seperti inilah yang disampaikan M. Amin Abdullah sebagai orang-orang yang tidak terpelajar.¹⁶

Nilai-nilai pluralisme dalam Islam dapat kita jumpai dalam al-Qur'an, misalnya dalam surat al-Hujurat, 13. Hanya terkadang karena fanatisme manusia yang membawa dia bukan kepada khilaf, tetapi kepada *syiqaq*. Bahkan realita yang di

¹⁵ Ibid., 3.

¹⁶ M. Amin Abdullah pada waktu perkuliahan berlangsung di IAN Surabaya tahun 2011. Dia mantan Rektor UIN Yogyakarta selama 2 periode yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam memperjuangkan gerakan Islam demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

temukan dalam sejarah perkembangan peradaban kemanusiaan, banyak sekali perbedaan pendapat yang mengarah kepada pertikaian, pembunuhan dan kesalah-fahaman yang merugikan kita sendiri.

Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada "situasi cerai berai" dan permusuhan yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak, tidak juga kepada kondisi "cerai berai" yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak.

Pluralitas juga tidak dapat disematkan kepada kesatuan yang tidak mempunyai parsial-parsial, atau yang bagian-bagiannya dipaksa untuk tidak menciptakan keutamaan, keunikan, dan kekhasan tersendiri. Setidaknya, ketika penilaian itu diletakkan dalam dunia nyata, bukan berdasarkan kemungkinan atau dasar kekuatan.

Anggota suatu keluarga adalah bentuk pluralitas dalam kerangka kesatuan keluarga dan sebagai antitesis darinya. Pria dan wanita adalah bentuk pluralitas dari kerangka kesatuan jiwa manusia. Bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah adalah bentuk pluralitas jenis manusia.¹⁷

Tanpa adanya kesatuan yang mencakup seluruh segi, maka tidak dapat dibayangkan adanya kemajemukan, keunikan, dan kekhasan atau pluralitas. Demikian juga sebaliknya.

Pluralitas mempunyai tingkatan-tingkatan yang ditentukan oleh faktor penyatu dan pengikat yang menyatukan dan mengikat masing-masing dimensinya dalam suatu kesatuan. Dalam tingkatan yang tinggi (misalnya) ada pluralitas peradaban yang mempunyai keunikan masing-masing. Demikian juga nasionalisme yang beragam, yang dibangun di atas dasar pluralitas hukum, metode, filsafat, bahasa dan budaya, yang nantinya semua itu disatukan oleh kesatuan kemanusiaan yang tidak ada perbedaan diantaranya.¹⁸

Anggapan yang menyatakan bahwa agama akan menemui ajal kematian, atau akan mengalami masa akhirnya pada abad ke-21 ternyata tidak terbukti sama sekali. Justru fenomena yang berkembang sejak akhir abad yang lalu sampai saat ini adalah mengentalnya keberagaman yang dapat ditemui pada semua penganut agama-agama besar di dunia.¹⁹

Namun seiring dengan bangkitnya agama-agama itu, kejahatan dan kekerasan dalam beragam bentuknya juga mengalami eskalasi yang cukup mengagetkan. Saat ini misi pendewasaan dan pencerahan manusia yang bersifat transformatif dalam rangka menuju kehidupan yang damai, kasih dan penuh rahmat yang diemban agama nyaris tidak menemukan lahan yang cukup subur di bumi ini. Agama bukan hanya membisu di hadapan kejahatan dan kekerasan, tapi agama sampai derajat tertentu ikut andil dalam memicu tindakan tersebut. Karena itu, alih-alih dapat mendewasakan manusia, agama terjebak ke dalam proses pengkerdilan manusia. Akibatnya, mereka menjadi makhluk yang sangat rentan, dan emosional, yang lebih mengedepankan kekuatan otot dan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dibandingkan dengan penyelesaian yang manusiawi, sistematis dan berjangkauan jauh

¹⁷ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 9.

¹⁸ *Ibid.*, 10.

¹⁹ Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme*, 135.

ke depan.

Melihat fenomena yang berkembang tersebut, telaah kritis atas pandangan Islam mengenai pluralisme perlu diangkat ke permukaan. Dari pencanderaan itu, kita mencoba memahami akar-akar kekerasan, terutama yang dikaitkan dengan agama. Dari sini rencana strategis ke depan dalam rangka memutus – minimal mengurangi – kekerasan menjadi niscaya untuk dibahas secara arif, kritis serta penuh keterbukaan.²⁰

Terjadinya anarkhisme, pembunuhan masal terhadap orang-orang tak berdosa (bom bunuh diri), pengrusakan fasilitas umum dan tempat-tempat ibadah dengan mengatasnamakan agama sangat tidak dibenarkan oleh agama apapun termasuk agama Islam.²¹ Pengkafiran terhadap kelompok lain yang tidak masuk dalam kelompoknya sudah mulai merambah ke negara-negara maju termasuk ke negara Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang selama ini hidup berdampingan sudah mulai terasuki oleh pengaruh-pengaruh ideologi baru atas nama Islam, namun pada realitanya penganut agama Islam baru ini selalu melakukan pengrusakan-pengrusakan serta pembunuhan-pembunuhan atas nama agama, atas nama jihad, dengan jaminan pelakunya masuk surga.

Kelompok-kelompok seperti ini tentunya harus lebih serius lagi memahami Islam tidak hanya secara tekstual belaka, namun harus melakukan kajian-kajian secara *continue* terhadap pemahaman Islam yang kontekstual. Sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan, tidak kemudian menganggap musuh akan tetapi merupakan khazanah serta dinamika dalam beragama. Disinilah pluralisme sangat dibutuhkan untuk menjembatani kelompok-kelompok Islam yang ekstrem dan radikal.²²

Pluralisme memiliki landasan teologis yang cukup kokoh dalam nilai dan ajaran Islam. Misalnya dalam al-Qur'an pada surat al-Hujurat ayat 13 serta khutbah Rasulullah saw dalam haji Wada' yang mencerminkan secara utuh tentang pandangan Islam mengenai pluralisme.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, menjadi praksis kehidupan sebagaimana terekam dalam Piagam Madinah,²³ yang berdasar pada nilai-nilai yang pluralistik itu. Hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari dua belas tahun sejak kelahirannya, Islam telah menjadi suatu pesona tersendiri bagi penduduk di Jazirah Arab dan sekitarnya. Bagaimana keberhasilan Rasulullah saw pada masa-masa akhir hayatnya dalam memperoleh pengakuan dari hampir seluruh semenanjung Arab, yaitu terletak pada propaganda dan diplomasi, dan bukan karena perang yang dilancarkannya.

Pola-pola diplomasi yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw merupakan representasi konkrit dari toleransi dan pluralisme yang selalu ditampakkan Nabi sepanjang hidupnya. Toleransi dan pluralis yang ditampakkan Nabi saw dan generasi awal Muslim adalah merupakan salah satu karakteristik penyebaran Islam di berbagai kawasan dunia. Esposito mengakui, bahwa umat Kristen sering melupakan bahwa ketika Islam melakukan ekspansi ke dunia Kristen, Islam terbukti lebih toleran serta

²⁰ Ibid., 136

²¹ Agama Islam, agama yang selalu mengajarkan perdamaian, kebersamaan serta keselarasan hidup bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, termasuk pada umat-umat yang berbeda agama sekalipun, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

²² Radikal adalah gerakan kelompok Islam yang melakukan dakwah dengan cara-cara kekerasan.

²³ Piagam Madinah itu dibuat atas kesepakatan antara umat Islam, Yahudi dan Nasrani dimana dari 47 pasal yang ada pada Piagam Madinah itu tidak ada satupun redaksi tentang Islam, al-Qur'an dan hadits. Yang ada hanyalah, bagi seluruh masyarakat Madinah di minta untuk menjaga stabilitas dan keamanan kota Madinah.

memberikan kebebasan yang lebih besar bagi kaum Yahudi, dan penduduk pribumi Kristen, serta menghapuskan penganiayaan terhadap orang-orang ahli bid'ah.

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerja sama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerja sama itu, tentunya akan diwujudkan dalam praktek kehidupan, terutama apabila ada dialog antar agama.²⁴ Prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul fiqh/teori legal hukum Islam; sesuatu yang membuat kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (*mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibuun*). Kerja sama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu, dialog antar agama juga menjadi kewajiban.

Dialog antar agama merupakan suatu keniscayaan untuk terciptanya demokrasi dan pluralisme agama-agama, karena hanya dengan dialog antar agama, maka akan tercipta negara yang *baladun thoyyibatun warobhun ghafur*. Dan cita-cita inilah yang diharapkan oleh seluruh umat manusia, khususnya agama Islam di Indonesia. Semoga pluralisme dan demokrasi dalam beragama menjadi jembatan terhadap utuhnya umat dalam berbangsa dan bernegara.

Sungguh memperhatikan melihat berbagai tindakan kekerasan yang muncul akhir-akhir ini. Kesadisan, kebingasan dan kebiadaban antar sesama manusia saat ini tampaknya sudah menjadi nestapa kelam dalam sebuah peradaban. Ironisnya, tindakan kekerasan itu muncul di tengah masyarakat yang terkenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.²⁵

Rentetan ledakan bom yang terjadi di berbagai tempat mulai dari Jakarta, Poso, Ambon hingga Manado dan Bali, yang telah menewaskan ratusan jiwa manusia tak berdosa, sungguh sangat memilukan. Apapun alasan dari peledakan bom tersebut, dengan jatuhnya banyak korban harta benda dan jiwa manusia, sungguh tidaklah dapat dibenarkan oleh agama. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan akan melahirkan dendam yang berkepanjangan dan akan merusak nilai-nilai peradaban, kebudayaan, demokrasi dan pluralisme. Penyelesaian masalah dengan kekerasan cenderung akan membuat manusia terperosok pada kebiadaban.²⁶

Di tengah gencarnya tuduhan pihak luar bahwa Indonesia merupakan sarang teroris dan merupakan tempat yang tidak aman lagi untuk dikunjungi, akan semakin terbukti dengan jelas karena memang akhir-akhir ini sering terjadi pengeboman di banyak daerah. Baru-baru ini terjadi bom bunuh diri di sebuah masjid Polres Cirebon yang mengakibatkan banyak korban luka-luka. Ini mengindikasikan bagaimana lemahnya nilai-nilai Islam yang mestinya Islam penuh dengan kedamaian untuk kemudian dipahami secara tekstual oleh sebagian kelompok Islam yang mengaku dirinya sebagai kelompok Islam militan. Dengan fenomena seperti ini, maka sangat di butuhkan pemahaman keislaman yang komprehensif dan menyeluruh, bukan sepotong-potong seperti yang dipahami oleh sebagian kecil umat Islam. Disinilah pentingnya pemahaman tentang demokrasi dan pluralisme dalam beragama, agar dalam menjalankan nilai-nilai agama tidak eksklusif (ekstrim).

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, cet.1 (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 134.

²⁵ Moral sinonim dengan etika, susila, adab dan sebagainya.

²⁶ Hamdan Daulay, *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Litbang Depaq RI), 209.

Penutup

Bahwa dalam surat al-Hujurat ayat 13 Allah dengan tegas menyampaikan diciptakannya manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling kenal mengenal. Tidak dibatasi oleh etnik, kultur, tapi semuanya demi kebersamaan tanpa pandang *background* apapun. Ini pula yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan non Muslim dalam membuat kesepakatan bersama yang di wujudkan dalam bentuk Piagam Madinah. Dimana di dalam Piagam Madinah sebanyak 47 pasal tidak ada satu pun kalimat Islam, Hadits dan al-Qur'an, akan tetapi inti dari pada isi Piagam Madinah adalah menjaga stabilitas keamanan Kota Madinah.

Berapa tingginya nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang dikembangkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada kita semua. Dan ini pula yang di kembangkan oleh (kalau boleh penulis menyebut) alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam melakukan komunikasi-komunikasi selama hidup, baik sebagai seorang tokoh organisasi keagamaan (NU), tokoh partai politik (PKB) bahkan ketika beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azra Azyumardi et.al. *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam* (Bandung: Nuansa, 2005).
Coward, Harold, *Pluralisme: Tantangan Bagi Agama-agama* (Yogyakarta: Kanasius, 1998).
Gaffar, Afan dkk. *Islam Demokrasi atas Bawah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
Hamdan. *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Litbang Depag RI).
Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
Kuswanjono, Arqom, *Ketuhanan dalam Telaah Filsafat Perennial* (Yogyakarta: UGM, 2006).
Lewis, Bernard, *Islam Leberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002).
Safi, Omed. *Progressive Muslims* (From the British Library, 2005).
Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam* (Bandung: Nuansa, 2005).
Wahid Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Insitute, 2006).